

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dari penjelasan-penjelasan yang terdapat pada bab-bab sebelumnya, maka penulis mencoba menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Peningkatan jumlah Wajib Pajak Terdaftar cukup tinggi tetapi tidak diarengi dengan peningkatan jumlah Wajib Pajak Efektif yang hanya meningkat sedikit yaitu untuk Wajib Pajak Terdaftar tahun 2005 sebesar 186,218 orang, dan tahun 2006 sebesar 236,376 orang, dan tahun 2007 sebesar 363,183 orang. Sedangkan untuk Wajib Pajak Efektif tahun 2005 mengalami kenaikan sebesar 87,734 orang, dan untuk tahun 2006 sebesar 105,080 orang, dan untuk tahun 2007 sebesar 156,131 orang.
2. Jumlah tingkat kepatuhan penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi mengalami penurunan dapat dilihat dari persentasenya untuk tahun 2005 sebesar 226.87%, untuk tahun 2006 tingkat kepatuhan mengalami penurunan sebesar 189.02%, sedangkan tahun 2007 tingkat kepatuhan mengalami penurunan sebesar 123.84%. Hal ini disebabkan kurangnya pemahaman dan kesadaran Wajib Pajak dalam menyampaikan atau melaporkan SPTnya.
3. Jumlah Wajib Pajak Efektif pada tahun 2005 adalah sebesar 87,734 orang lebih besar dibanding dengan Penerimaan Pajak tahun 2005 adalah sebesar 16,461 (dalam jutaan) untuk tahun 2006 Wajib Pajak Efektif adalah sebesar

105,080 orang lebih besar dibanding dengan Penerimaan Pajak tahun 2006 adalah sebesar Rp 16,484 (dalam jutaan) sedangkan untuk tahun 2007 Wajib Pajak Efektif pada tahun 2007 adalah sebesar 156,131 orang lebih besar dibanding dengan Penerimaan Pajak tahun 2005 adalah sebesar Rp 15,271 (dalam jutaan).

4. Dari Analisis Perhitungan Regresi Linier Sederhana yang digunakan untuk meneliti hubungan antara sebuah variabel X (Wajib Pajak Efektif) dengan variabel Y (Penerimaan Pajak PPh Orang Pribadi) dimana dari perhitungan di atas didapatkan persamaan regresi yaitu : $Y = 933.05 + 0.13 X$.

Maksud dari persamaan tersebut ada'ah apabila nilai $b = 0,13 X$ yang berarti bahwa kalau X (Wajib Pajak Efektif) naik sebesar 1,000,000,00 Wajib Pajak, maka Y (Penerimaan PPh Orang Pribadi) akan bertambah 0,13 kali. Jadi kalau Wajib Pajak Efektif naik Rp 1,000,000,00 Penerimaan PPh Orang Pribadi bertambah $0.13 \times \text{Rp } 1,000,000,00 = \text{Rp } 130,000,00$.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diuraikan diatas, Penulis m ngajukan beberapa saran atau usulan perbaikan yang diharapkan dapat bermanfaat bagi KPP PRATAMA Bekasi Utara yaitu :

1. Meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi antara petugas pajak (fiskus) dengan Wajib Pajak dengan cara meningkatkan pelayanan, ataupun dengan cara memberikan pembinaan pada Wajib Pajak secara *door to door* tentang hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak, karena dari hasil pengamatan

selama ini menunjukkan bahwa KPP PRATAMA Bekasi Utara telah menerapkan dengan cukup baik dan sesuai dengan Undang-undang Perpajakan dalam hal pelaksanaan, sarana penyampaian SPT Tahunan Orang Pribadi dan proses administrasi yang dilakukan terhadap tingkat penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi, sehingga dengan kerjasama yang baik tersebut akan dapat meningkatkan Penerimaan Pajak Orang Pribadi.

2. Melakukan perbaikan administrasi karena dari hasil penelitian selama ini menunjukkan bahwa banyak informasi mengenai Wajib Pajak Orang Pribadi yang tidak patuh berkaitan dengan nama Wajib Pajak, alamat Wajib Pajak, KLU Wajib Pajak. Perbaikan administrasi ini sangat diperlukan dalam upaya meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam menyampaikan SPT Tahunannya.
3. Diperlukannya upaya peningkatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak dalam rangka meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi khususnya di KPP PRATAMA Bekasi Utara.
4. Sebaiknya dilakukan upaya perbaikan untuk meningkatkan kualitas kerja dari Sumber Daya Manusia, dan faktor penunjangnya harus lebih diperhatikan lagi agar produktifitas kerja yang maksimal dapat tercapai.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2003 *Perpajakan Edisi Revisi*. Yogyakarta: Andi.
- Nashir, Muhammad. *Metode Penelitian*. 1988. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Rusdji, Muhammad. 2004. *Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan*. Jakarta: PT.Indeks
- Prasetya, Adinur dkk. 2006. *Tinjauan Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Koperasi Pegawai Kantor Pusat Direktorat Jenderal Pajak.
- Suharyadi dan Purwanto. 2003. *Statistik Untuk Ekonomi Dan Keuangan Modern*. Jakarta: Salemba Empat.
- Waluyo. 2003. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat.
- Undang-undang dan Peraturan :
- _____ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Dan Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan.
- _____ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1991, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1994 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama Lengkap : Dian Ratna Sari

NIM : 03420023

Jenis Kelamin : Perempuan

Alamat : Kmp. Rawa Bambu Jalan Alexindo RT. 05/RW. 16 No. 34
Kelurahan : Harapan Jaya, Kecamatan : Bekasi Utara. Kota
Bekasi.

No Telepon / HP : (021) 8893874 / 085694913907

Pendidikan : SDN Harapan Jaya IV, Bekasi lulus Tahun 1997
SLTPN 5, Bekasi lulus tahun 2000
SMU Martia Bhakti, Bekasi lulus tahun 2003
S I Progra n Studi Akuntansi, Konsentrasi Perpajakan,
Fakultas Ekonomi, Universitas Darma Per ada.





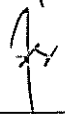

Keterangan Lain-lain :

a. Hobi : Memasak, Berbelanja, dan lain-lain.

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA
NIM
DOSEN PEMBIMBING

Dian Retna Sari
02420022
Dis Bredy Setyo Hartono, Ak, MM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	2/1/08	BAB I	
II	16/1/08	REVISI BAB I	
III	6/2/08	BAB II, BAB III	
IV	20/2/08	REVISI BAB II, BAB III	
V	3/3/08	BAB IV, BAB V	
VI	17/3/08	REVISI BAB IV, BAB V	

Tanggal mulai bimbingan : 2/1/08

Tanggal selesai bimbingan : 30/7/08

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.

LEMBAR KEGIATAN PENYUSUNAN SKIRPSI

NAMA MAHASISWA





: Dian Ratna Sari

NIM

: 01420032

DOSEN PEMBIMBING

: Drs. Budi Setyo Hartono, A.E. NM

KONSULTASI KE	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBAHAS	PARAF PEMBIMBING
I	4/6/08	ACC BAB I	
II	9/7/08	ACC BAB II, BAB III	
III	30/7/08	ACC BAB IV, BAB V	
IV	1/8/08	Final	
V			
VI			

Tanggal mulai bimbingan : 2/1/08

Tanggal selesai bimbingan : 30/7/08

CATATAN :

Tanggal mulai bimbingan dicantumkan sejak dikeluarkannya surat ini.



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR WILAYAH DJP JAWA BARAT II
KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA BEKASI UTARA

Jl. Sersan Arwan Margakarya
Bekasi - 17112

Telepon : (021) 3808059, 8803253
Faksimil : (021) 8302525

SURAT KETERANGAN
NO: S. 66 /WPII2/JP.0101/2008

Tang beranda tangeran dibesok ini

Nama : Adi Purwanto Suharsono, SH, M.M.
NIP : 060042546
Pangkat Golongan Ruang : Pembina / IV.a
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum
Satuan Organisasi : Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

lengan ini menerangkan dengan sesungguhnya bahwa

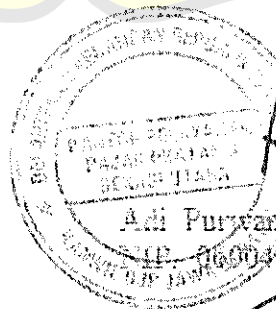
Nama : Dian Rama Sari
NIM : 00220013
Jurusan : Administrasi Perpajakan Universitas Dharma Persada

telah melaksanakan magang pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara terhitung mulai tanggal 07 April 2008 sampai dengan tanggal 11 Mei 2008

Demikian surat keterangan di buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 12 Mei 2008

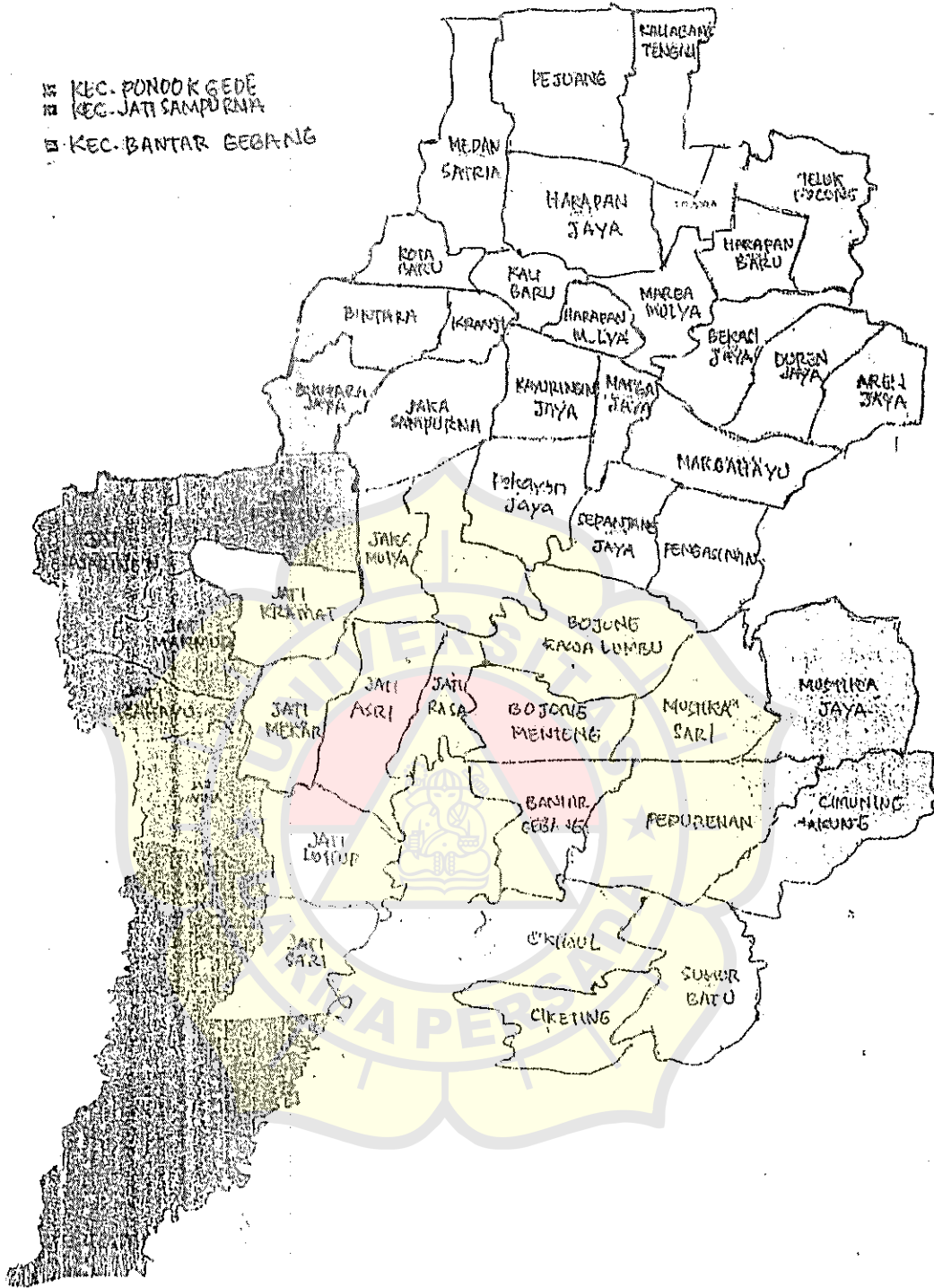
Kepala Sub Bagian Umum.



Adi Purwanto Suharsono, SH, M.M.
NIP. 060042546

PETA KOTA BEKASI / Map of Bekasi Municipality

- ▨ KEC. PONDOK GEDE
- ▨ KEC. JATI SAMPURNA
- ▨ KEC. BANTAR BEBAN



LEMBAR PENGAWASAN ARUS DOKUMEN

Nomor : 09 April 2008 Jam : 11:48 NTB :

Diterima dari Tanggal POS

NTPP :

EDI SUMARDI

49.627.242.8-407.0

ma : JL. BINTARA I NO. RT.013 RW.002

N.P.W.P :

mat : KOTAMADYA BEKASI

No. P.K.P :

2007

SPT TAHUNAN PPH OP., NIHIL Rp. 0.00

Ms/Thn pajak :

is Pajak : Tgl. Masuk : 26 Maret 2008

Penerima : MUHAJIDIN

TEMPAT PELAYANAN TERPADU	
Uraian	Prf/Tg
urat diterima : 1. langsung
2. melalui pos

Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
1. Seksi :
2. Diterima Seksi
3. Selesai diproses

Uraian	Prf/Tg
PENYIDIKAN	
1. Diberitahukan kepenuntut umum
2. Penyidikan
3. Selesai disidik
4. Disampaikan kepenuntut umum

SEKSI TERKAIT	
Uraian	Prf/Tg
Diteruskan ke :	
Seksi :
Diterima Seksi
Selesai diproses
Diteruskan ke :	
Seksi :
Diterima Seksi
Selesai diproses
Diteruskan ke :	
Seksi :
Diterima Seksi
Selesai diproses

PENGELOLAAN SPT. Tahunan PPh / masa PPN

Uraian	Prf/Tg
PENGOLAHAN SPT	
1. Dicatat pada 1Q-1
2. Selesai di-Edit
3. Selesai direkam
4. Dicatat pada 1Q-2
PEMERIKSAAN	
6. Lengkap
7. Sederhana :	
7.1. Lapangan
7.2. Kantor

Uraian	Prf/Tg
PENETAPAN	
1. STP
2. SKPN
3. SKPKB
4. SKPKBT
5. SKPLB

Uraian	Prf/Tg
RESTITUSI	
1. SKPKPP
2. SPMKP

Uraian	Prf/Tg
PENGARSIPAN	
1. Dimasukkan keinduk berkas
2. Diteruskan ke :
3. Diterima kembali



DEPARTEMEN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH PRATAMA BEKASI UTARA

(021) 8808059, KANTOR PELAYANAN PAJAK

8802525

pon :

Facsimile :

BUKTI PENERIMAAN SURAT

Diterima dari Nomopos

EDI SUMARDI

ma : JL. BINTARA I NO. RT.013 RW.002

mat : KOTAMADYA BEKASI

SPT TAHUNAN PPH OP., NIHIL Rp. 0.00

is Pajak : Tgl. Masuk : 26 Maret 2008

NTB :

NTPP :

49.627.242.8-407.0

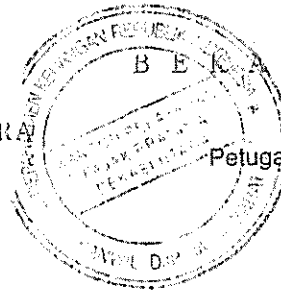
N.P.W.P :

No. P.K.P :

2007

Ms/Thn Pajak :

PRATAMA BEKASI UTARA

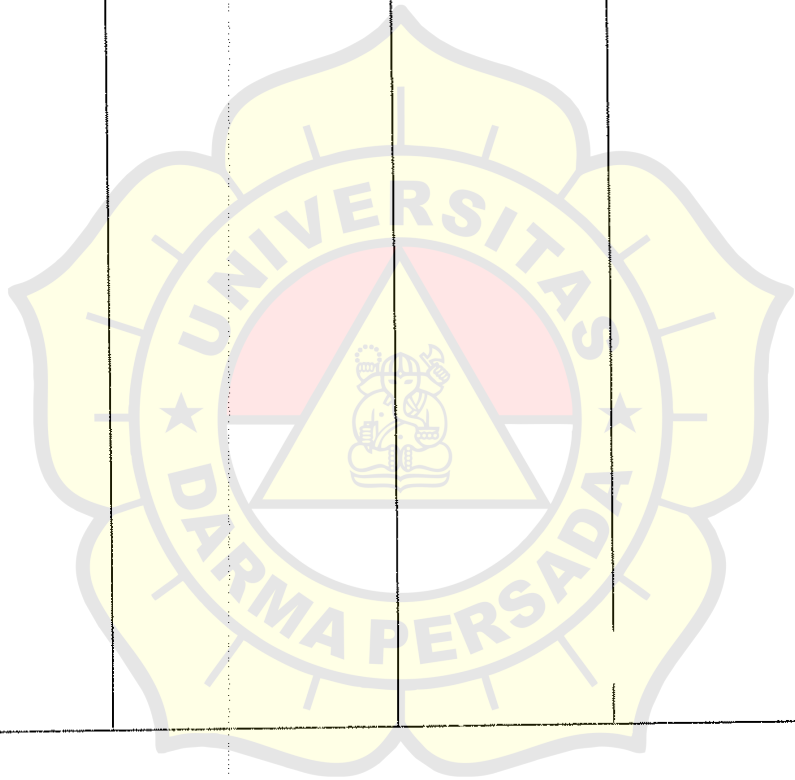


Petugas penerima,

1. 09 April 2008

DAFTAR SUSUNAN KELUARGA YANG MENJADI TANGGUNGAN

NO	NAMA	UMUR TANGGAL LAHIR	HUBUNGAN KELUAR GA	PEKERJAAN	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)



Bekasi,.....

Wajib Pa ak

()

MEMPUNYAI PENGHASILAN :

- DARI SATU ATAU LEBIH PEMBERI KERJA
- DALAM NEGERI LAINNYA
- YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

2	0		
---	---	--	--

PERHATIAN • SEBELUM MENGISI BACA DAHULU BUKU PETUNJUK PENGISIAN • ISI DENGAN HURUF CETAK DAN KETIK DENGAN TINTA HITAM • BERI TANDA (*) PADA (KOTAK PILIHAN) YANG SESUAI

IDENTITAS	NPWP	<input type="text"/>												
	NAMA WAJIB PAJAK	<input type="text"/>												
	PEKERJAAN	<input type="text"/>										KLU :	<input type="text"/>	
	NO. TELEPON	<input type="text"/>				NO. FAKS :				<input type="text"/>				
	PERUBAHAN DATA	<input type="checkbox"/>	LAMPIRAN TERSENDIRI	<input type="checkbox"/>	TIDAK ADA									

*1) Pangisian kolom-kolom yang berisi nilai rupiah harus tanpa nilai desimal (contoh pengisian lihat buku petunjuk hal. 3)

		RUPIAH *)
A. PENGHASILAN NETO	1 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI SEHUBUNGAN DENGAN PEKERJAAN <small>[Disisi akumulasi jumlah penghasilan neto pada setiap Formulir 1721-A1 dan/atau 1721-A2 angka 14 yang dilampirkan]</small>	<input type="text"/>
	2 PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA <small>[Disisi sesuai dengan Formula 1770 S-1 Jumlah Bagian A.]</small>	<input type="text"/>
	3 PENGHASILAN NETO LUAR NEGERI <small>[Apabila memiliki penghasilan dari luar negeri agar diisi dan Lampiran Tersendiri, lihat buku petunjuk]</small>	<input type="text"/>
	4 JUMLAH PENGHASILAN NETO (1+2+3)	<input type="text"/>
	5 ZAKAT ATAS PENGHASILAN YANG MENJADI OBJEK PAJAK	<input type="text"/>
	6 JUMLAH PENGHASILAN NETO SETELAH PENGURANGAN ZAKAT ATAS PENGHASILAN (4-5)	<input type="text"/>

B. PENGHASILAN KEWAJIBAN	7 PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK TK/ <input type="checkbox"/> K/ <input type="checkbox"/> K/L/ <input type="checkbox"/> PH/ <input type="checkbox"/> HB/ <input type="checkbox"/>	<input type="text"/>
	8 PENGHASILAN KEWAJIBAN (6-7)	<input type="text"/>

C. PPh TERUTANG	9 PPh TERUTANG (TARIF PASAL 17 UU PPh x ANGKA 8)	<input type="text"/>
	10 PENGEMBALIAN / PENGURANGAN PPh PASAL 24 YANG TELAH DIKREDITKAN	<input type="text"/>
	11 JUMLAH PPh TERUTANG (9+10)	<input type="text"/>

D. KREDIT PAJAK	12 PPh YANG DIPOTONG/DIPUNGUT PIHAK LAIN/DITANGGUNG PEMERINTAH DAN/ATAU KREDIT PAJAK LUAR NEGERI DAN/ATAU TERUTANG DI LUAR NEGERI [Disisi dari Formulir 1770 S-1 Jumlah Bagian C Kolom (7)]	<input type="text"/>
	13 a. <input type="checkbox"/> PPh YANG HARUS DIBAYAR SENDIRI (11-12)	<input type="text"/>
	b. <input type="checkbox"/> PPh YANG LEBIH DIPOTONG/DIPUNGUT	<input type="text"/>
	14 PPh YANG DIBAYAR SENDIRI a. PPh PASAL 25	<input type="text"/>
	b. STP PPh Pasal 25 (Hanya Pokok Pajak)	<input type="text"/>
c. FISKAL LUAR NEGERI	<input type="text"/>	
15 JUMLAH KREDIT PAJAK (14a + 14b + 14c)	<input type="text"/>	

E. PPh (KURANG/LEBIH BAYAR	16 <input type="checkbox"/> a. PPh YANG KURANG DIBAYAR (PPh PASAL 29)	<input type="text"/>
	<input type="checkbox"/> b. PPh YANG LEBIH DIBAYAR (PPh PASAL 28 A)	<input type="text"/>
17 PERMOHONAN : PPh Lebih Bayar pada 16b mohon	a. <input type="checkbox"/> DIRESTITUSIKAN	<input type="text"/>
	b. <input type="checkbox"/> DIPERHITUNGKAN DENGAN UTANG PAJAK	<input type="text"/>

F. ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA	18 ANGSURAN PPh PASAL 25 TAHUN PAJAK BERIKUTNYA SEBESAR	<input type="text"/>
	DIHITUNG BERDASARKAN	
	a. <input type="checkbox"/> 1/12 x JUMLAH PADA ANGKA 13	
	b. <input type="checkbox"/> PENGHITUNGAN DALAM LAMPIRAN TERSENDIRI	

G. LAMPIRAN	a. <input type="checkbox"/> Fotokopi Formulir 1721-A1 atau 1721-A2 atau Buku Polong PPh Pasal 21	d. <input type="checkbox"/> Surat Kuasa Khusus (Bila dikuasakan)
	b. <input type="checkbox"/> Daftar Susunan Keluarga yang menjadi Tanggungan Wajib Pajak	e. <input type="checkbox"/>
	c. <input type="checkbox"/> Surat Setoran Pajak Lembar ke-3 PPh Pasal 29	

PERNYATAAN

Dengan menyadari sepenuhnya akan segala akibatnya termasuk sanksi-sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, saya menyatakan bahwa yang telah saya berisikan diatas beserta lampiran-lampirannya adalah benar, lengkap dan jelas.

TANDA TANGAN

WAJIB PAJAK KUASA TANGGAL

NAMA LENGKAP :

NPWP :

- PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
- PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK
- DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NPWP

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN NETO DALAM NEGERI LAINNYA
(Tidak Termasuk Penghasilan Dikenakan PPh Final dan/atau Bersifat Final)

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bunga	
2	Dividen	
3	Royalti	
4	Sewa	
5	Penghargaan dan Hadiah	
6	Keuntungan dari Penjualan / Pengalihan Harta	
7	Penghasilan Lainnya	
JUMLAH BAGIAN A		JBA

Pindahkan Jumlah Bagian A ke Formulir Induk 1770 S Bagian A angka (2)

BAGIAN B : PENGHASILAN YANG TIDAK TERMASUK OBJEK PAJAK

NO.	JENIS PENGHASILAN	JUMLAH PENGHASILAN (Rupiah)
(1)	(2)	(3)
1	Bantuan / Sumbangan / Hibah	
2	Warisan	
3	Bagian Laba Anggota Perseroan Komanditer Tidak Atas Saham, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi	
4	Klaim Asuransi Kesehatan, Kecelakaan, Jiwa, Dwiguna, Beasiswa	
5	Penghasilan Lainnya yang Tidak Termasuk Objek Pajak	
JUMLAH BAGIAN B		JBB

BAGIAN C : DAFTAR PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh OLEH PIHAK LAIN DAN PPh YANG DITANGGUNG PEMERINTAH

NO.	NAMA PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	NPWP PEMOTONG/ PEMUNGUT PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/ PEMUNGUTAN		JENIS PAJAK : PPh PASAL 21/ 22/23/24/26/DTP	JUMLAH PPh YANG DIPOTONG / DIPUNGUT
			NOMOR	TANGGAL		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
dst						
JUMLAH BAGIAN C					JBC	

Catatan :

- *) - DTP : Ditanggung Pemerintah
- Kolom (6) diisi dengan pilihan PPh Pasal 21, 22, 23, 24, 26, DTP
- Jika terdapat kredit pajak PPh Pasal 24, maka jumlah yang diisi adalah maksimum yang dapat dikreditkan sesuai lampiran tersendiri

(lihat buku petunjuk tentang Lampiran I Bagian C dan Induk SPT angka 3)

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIBUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI

Halaman ke- dari halaman Lampiran-I

Pindahkan Jumlah Bagian C ke Formulir Induk 1770 S Bagian D angka (12)

- PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL
- DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN
- DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

N P W P

NAMA WAJIB PAJAK

BAGIAN A : PENGHASILAN YANG DIKENAKAN PPh FINAL DAN/ATAU BERSIFAT FINAL

NO.	SUMBER/JENIS PENGHASILAN	DASAR PENGENAAN PAJAK/ PENGHASILAN BRUTO	PPh TERUTANG (Rupiah)
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Bunga Deposito, Tabungan dan Diskonto SBI		
2	Bunga/Diskonto Obligasi yang Dilaporkan Perdagangannya di Bursa Efek		
3	Penjualan Saham di Bursa Efek		
4	Hadiah Undian		
5	Pesangon, Tunjangan Hari Tua dan Tebusan Fensiun yang Dibayar Sekaligus		
6	Honorarium atas Beban APBN/APED		
7	Pengalihan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan		
8	Sewa atas Tanah dan/atau Bangunan		
9	Bangunan yang Diterima Dalam Rangka Bangun Guna Serah		
10	Penghasilan yang Dikenakan Pajak Bersifat Final :		
	10a Penghasilan Isteri cari Satu Pemberi Kerja		
	10b Penghasilan Anak dari Pekerjaan		
11	Penghasilan Lain yang dikenakan Pajak Final dan/ atau Bersifat Final		
	JUMLAH BAGIAN A		JBA

BAGIAN B : DAFTAR HARTA PADA AKHIR TAHUN

NO.	JENIS HARTA	TAHUN PEROLEHAN	HARGA PEROLEHAN (Rupiah)	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				
	JUMLAH BAGIAN B	JBB		

BAGIAN C : DAFTAR KEWAJIBAN/UTANG PADA AKHIR TAHUN

NO.	NAMA PEMBERI PINJAMAN	ALAMAT PEMBERI PINJAMAN	TAHUN PEMINJAMAN	JUMLAH
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1				
2				
3				
4				
5				
6				
dst				
	JUMLAH BAGIAN C		JBC	

1721 - A2

DEPARTEMEN KEUANGAN RI
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

LAMPIRAN I - B

SPT TAHUNAN PPh PASAL 21

PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 PEGAWAI
NEGERI SIPIL, ANGGOTA TNI / POLRI, PEJABAT NEGARA DAN
PENSUNANNYA

TAHUN TAKWIM

2. Lembar 2 untuk Pemotong Pajak
3. Lembar 3 untuk Pegawai

2 0

NO URUT

INSTANSI / BADAN LAIN

BENDAHARA

BENDAHARA

BENDAHARA

PEGAWAI / PENSUNAN

NRP

PEGAWAI / PENSUNAN

PEGAWAI / PENSUNAN

KATEGORI / GOLONGAN

JANIS

STATUS DAN JENIS KELAMIN

TANGGUNG JAWAB KELUARGA UNTUK PTKP

PEROLEHAN PENGHASILAN

KAWIN TIDAK KAWIN LAKI-LAKI PEREMPUAN

K/ TK/ HB/

SD

RINCIAN PENGHASILAN DAN PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 SEBAGAI BERIKUT :

RUPIAH

PENGHASILAN BRUTO :

- GAJI POKOK / PENSUN
- TUNJANGAN ISTERI
- TUNJANGAN ANAK
- JUMLAH GAJI DAN TUNJANGAN KELUARGA (1+2+3)
- TUNJANGAN PERBAIKAN PENGHASILAN
- TUNJANGAN STRUKTURAL / FUNGSIONAL
- TUNJANGAN BERAS
- TUNJANGAN KHUSUS
- TUNJANGAN LAIN-LAIN
- JUMLAH PENGHASILAN BRUTO (4 S.D 9)

1	
2	
3	
4	
5	
6	
7	
8	
9	
10	

PENGURANGAN

- BIAYA JABATAN / BIAYA PENSUN
- IURAN PENSUN ATAU IUFAN THT
- JUMLAH PENGURANGAN (11 + 12)

11	
12	
13	

PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 :

- JUMLAH PENGHASILAN NETO (10 - 13)
- JUMLAH PENGHASILAN NETO UNTUK PENGHITUNGAN PPh PASAL 21 (SETAHUN/DISETAHUNKAN)
- PENGHASILAN TIDAK KENA PAJAK (PTKP)
- PENGHASILAN KENA PAJAK SETAHUN / DISETAHUNKAN (15 - 16)
- PPh PASAL 21 TERUTANG
- PPh PASAL 21 YANG TELAH DIPOTONG
- JUMLAH PPh PASAL 21 :
 - YANG KURANG DIPOTONG (18 - 19)
 - YANG LEBIH DIPOTONG (19 - 18)

14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	

PEGAWAI TERSEBUT DIPINDAHKAN PINDAHAN BARU PENSUNAN

TANDA TANGAN BENDAHARA (Tempat) Tgl Bln Thn
Tanda Tangan dan Cap

BENDAHARA

NAMA

NIP/NRP

JIKA FORMULIR INI TIDAK MENCUKUPI, DAPAT DIGUAT SENDIRI SESUAI DENGAN BENTUK INI